



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PEMILU 2009 DAN TANTANGAN DEMOKRASI

Makalah ini disampaikan pada Workshop Proses Penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2009, Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU/D) Kabupaten Solok, pada 3 Desember 2009 di Solok

Oleh

Eka Vidya Putra

| | |
|---------------------------|-------------------|
| UNIVERSITAS NEGERI PADANG | |
| TANGGAL TOL : | 31-12-2010 |
| UMBER KARGA : | Hd |
| UMBER KOLEKSI : | 1-1 |
| NO. INVENTARIS : | 437 Hd/2010-P.1.1 |
| NO. KARTU : | |

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

PEMILU 2009 DAN TANTANGAN DEMOKRASI*

Oleh : Eka Vidya Putra*

Perjalanan transisi dari rezim otoriter menuju pemerintahan yang demokratis tidak terasa akan memasuki fase ketiga. Para transisiolog menghitung fase transisi demokrasi dari tahapan pelaksanaan Pemilu. Sejak orde reformasi digulirkan tahun 1998, kita telah melewati dua kali Pemilu sekaligus berarti telah dua kali fase transisi. Dalam petunjuk manual demokrasi, suatu negara dapat mencapai konsolidasi demokrasi jika telah melewati lima kali penyelenggaraan Pemilu. Artinya, jika tidak ada aral melintang bulan April di tahun 2009 yang akan datang, Indonesia akan masuk pada tahapan ketiga dari proses transisi ke demokrasi.

Hitungan fase atau tahapan dalam perjalanan transisi tentu saja tidak sebatas angka yang tanpa makna. Fase pertama dan kedua lebih diarahkan pada bagaimana sebuah negara membangun prosedural demokrasi. Walaupun dibahasakan sebagai fase prosedural demokrasi, namun ketika dilaksanakan ia mengandung makna substansi. Artinya, kedua fase awal tersebut sangat penting dan menentukan untuk meletakkan pondasi demokrasi yang terkonsolidasi. Tingkat kerumitannya fase awal ini adalah bagaimana membatasi dan mengatur euforia liberalisasi (kebebasan) pada masyarakat. Kondisi liberalisasi (kebebasan) merupakan titik kritis ketika akan memulai bangunan rumah demokrasi. Karena demokrasi bukanlah bangunan tanpa dinding. Sebaliknya demokrasi adalah sistem pengelolaan sebuah negara yang memiliki batasan dan aturan. Dimana batasan dan aturan tersebut disusun atas dasar kebebasan dan kesejajaran.

Hingga dipenghujung tahun 2008, bangunan demokrasi kita sudah sudah menunjukkan pratanda yang baik. Sirkulasi Pemilu telah terjadwal dan diselenggarakan tepat waktu; Pemilu diselenggarakan oleh komisi khusus yang relatif idenpenden. Hal tersebut setidaknya terbukti dari penyelenggaraan dua Pemilu terakhir. Kondisi tersebut diakui oleh pemilih, pengamat maupun para praktisi politik. Dua pemilu diawal era reformasi berjalan secara jujur dan adil; partai politik lahir dan tumbuh sebagai wujud dari kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul; organisasi masyarakat sipil (media masa, organisasi masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi) tumbuh secara luas dalam masyarakat.

Meskipun masyarakat kita telah terbiasa mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu), dan para penyelenggarapun telah berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu, namun bukan berarti tantangan Pemilu 2009 akan jauh lebih ringan. Bisa jadi sebaliknya tantangan Pemilu 2009 akan jauh lebih berat dibandingkan Pemilu-pemilu sebelumnya.

* Dipresenasikan pada Workshop Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD) Kabupaten Solok, Solok, 3 Desember 2008

* Dosen Fakultas Ilmu-ilmu Sosial – Universitas Negeri Padang dan Direktur Revolt Institute

Kondisi tersebut akan berkulindan dengan terus menguatnya tuntutan masyarakat untuk segera menuntaskan krisis ekonomi yang dirasakan semakin memberatkan dan tak berkesudahan. Rakyat mulai putus asa dengan reformasi. Keramat kata reformasi mulai kehilangan tuah. Akibatnya

Tantangan Pemilu

Terdapat sejumlah hal yang menjadi tantangan dalam Pemilu 2009, diantaranya;

Pertama, dari segi penyelenggara. (1) Masalah sosialisasi masih menjadi sorotan banyak kalangan. Walaupun KPU sendiri merasa sudah melakukan sesuatu yang optimal. Luas wilayah, miskin inovasi dan tingkat heterogenitas (pendidikan, ekonomi dan sosial budaya) masyarakat menjadi kendala mengapan sosialisasi tidak efektif. (2) Selain sosialisasi titik lemah penyelenggaraan Pemilu yang tiap tahun tidak terbenahi dengan cukup baik adalah masalah daftar pemilih. Terakhir pada Pilkada Kota Padang, kembali masalah data pemilih menjadi sorotan publik. (3) Masih rentannya hubungan antara KPU dengan sekretariat dan piranti pelengkap lainnya. (4) Kuliatas penyelenggara Pemilu itu sendiri. Berdasarkan catatan, komposisi anggota KPU kabupaten dan kota jika dibandingkan antara yang lama dengan yang baru, jumlah anggota yang baru lebih banyak dibandingkan dengan yang lama. Kondisi tersebut berbeda dengan anggota KPU Sumatera Barat rata-rata anggotanya merupakan wajah lama. Dominasi wajah baru dalam komposisi KPU kabupaten dan kota dapat dilihat sebagai kekuatan dan sekaligus kelemahan.

Kedua, tingkat partisipasi politik masyarakat. Angka rata-rata kehadiran pemilih dalam Pilkada mencapai 27%. Namun jika buka perderah kita akan temukan ada sejumlah wilayah yang angka keterlibatan pemilihnya mendekati 50%. Di Sumatera Barat contohnya dalam Pilkada di Kota Bukittinggi dan Kota Padang yang pengguna hak pilih hanya 52% dan 57%. Itu belum kita masukan pemilih yang tidak terdata. Secara nasional, hampir diseluruh penyelenggaraan Pilkada suara yang tidak menggunakan hak pilih masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemenang Pilkada itu sendiri. Banyak alasan yang dapat diprakirakan kenapa tingkat partisipasi masyarakat terus mengalami penurunan. Diantara kemungkinannya adalah; (1) Rendah dan tidak efektifnya sosialisasi, pendidikan politik dan komunikasi politik pada masyarakat. Masyarakat kita belum berhasil menjelaskan dengan baik hubungan antara Pemilu dengan aktivitas keseharian. Kondisi ini kemudian melahirkan sikap apatis atau masa bodoh dari masyarakat. (2) Frustrasi politik, frustrasi politik biasanya muncul dari kelompok-kelompok pemilih rasional. Perguruan Tinggi merupakan kelompok masyarakat yang cukup besar tidak menggunakan hak pilih. Kelompok ini belakangan terus meluas. Gejala tersebut meluas dengan munculnya sikap politik masyarakat

semakin tidak percaya pada partai politik, pada Pemilu atau Pilkada. Walau sikap politik tersebut belum terrealisasi dalam perilaku pemilih. Mereka beranggapan bahwa politik merupakan aktivitas kotor yang penuh dengan tipu muslihat, suka menanam tebu dibibir, suka baladang dipunggung orang. Sikap seperti ini dapat disebut dengan sikap sinis.

Ketiga, Pesta demokrasi kita masih rentan dengan konflik horizontal, dan vertikal. Konflik dapat terjadi di awal, tengah atau akhir penyelenggaraan proses Pemilu. Realitas politik kita masih sangat jauh dari sikap kedewasaan. Sikap "siapa kalah, dan siapa menang" baru sebatas komitmen di atas kertas. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal, setidaknya ada dua kondisi yang paling berpengaruh yaitu masalah rekayasa politik dari elite, masalah keotentikan. Pandangan para elit (disemua ranah kehidupan) masih menilai masyarakat kita sebagai kelompok tradisional. Ironisnya, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek, yang seharusnya mesti bertanggungjawab untuk melakukan pencerdasan politik.

Transisi Demokrasi

Menurut para transisiolog, Pemilu ketiga setelah tumbang rezim otoriter merupakan saat yang tepat untuk mengukur apakah nilai-nilai substantif demokrasi telah masuk pada tahap pelembagaan politik atau masih terus larut dalam euforia liberalisasi politik. Pada konteks ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan Pemilu ke depan tidak hanya dinilai dari apakah telah terlaksananya Pemilu tepat waktu, jujur, adil dan partisipatif. Tapi jauh dari itu, Pemilu dilihat secara kualitas pada proses dan capaiannya. Kualitas proses adalah apakah Pemilu telah disadari oleh seluruh komponen bangsa sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sedangkan pada kualitas capaian adalah apakah hasil dari Pemilu tersebut telah menggambarkan kehendak rasional masyarakat.

Maka tidak terlalu berlebihan jika urgensi perhelatan demokrasi ketiga di era reformasi merupakan pertarungan besar, apakah keberlangsungan transisi telah mengarah ke arah demokrasi atau justru telah ditelung di tengah jalan. Untuk sampai ke sana, keterlibatan seluruh komponen masyarakat mulai dari penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Kelompok Masyarakat Sipil menjadi sangat penting. Orientasi kinerja KPU dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu, sudah patut digeser. Orientasinya tidak seharusnya tidak lagi pada bagaimana terselenggaranya sirkulasi Pemilu yang tepat waktu, dan berjalan secara jujur dan adil, tapi jauh dari itu lebih berkonsentrasi pada kualitas dari Pemilu itu sendiri. Partai politik yang selama ini hanya terkonsentrasi pada kepentingan politik jangka pendek juga harus mengubah paradigma. Begitu juga dengan Kelompok masyarakat sipil harus semakin mandiri. Akhirnya, jika tidak hati-hati menyikapi situasi yang berkembang maka kita semua harus bersiap-siap untuk mendengar lonceng kematian bagi proses demokrasi yang sedang berjalan.